

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016 periode tahun pertama dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Visi yang ditetapkan **"TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"**. Untuk mewujudkan visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kemandirian daerah;
4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata ; dan
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Wonosobo 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan pertahunnya yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain 5 strategi dasar/umum yang sudah dituangkan pada sub bab sebelumnya, maka pada tataran yang lebih nyata, dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai misi, mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran.

Selengkapnya, strategi dan arah kebijakan pada masing-masing sasaran bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.a. Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Peningkatan nilai- nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat	Mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik serta menciptakan iklim demokrasi
	Penguatan implementasi kebijakan pelaksanaan Wonosobo Ramah HAM	Meningkatkan kesadaran tentang Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM
1.b. Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga toleransi dan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat
		Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan
		Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung toleransi dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan
1.c. Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong	Meneguhkan kembali budaya gotong royong sebagai sikap hidup masyarakat	Memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan menempatkan penduduk sebagai basis sentral pembedayaan dan prioritas pembangunan
1.d .Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Penguatan pranata sosial dan pengembangan kemitraan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini	Memperkuat pranata sosial melalui kemitraan pemerintah, lembaga dan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan
	Transformasi kebijakan fungsi penegakan Perda	Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal secara proaktif

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Mengembangkan metode penegakan Perda secara lebih partisipatif
	Pengembangan sistem pendukung untuk penanganan gangguan keamanan dan peningkatan ketangguhan masyarakat	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas untuk menjaga stabilitas, ketentraman, dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Membangun data basis terintegrasi sebagai sistem penopang perencanaan
		Menguatkan kapasitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif
	Penataan dan penguatan organisasi dan tatalaksana	Membangun kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
		Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
	Penataan Manajemen SDM	Membangun sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera
	Mewujudkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi
	Membangun dan mengembangkan sistem prosedur serta tata kerja birokrasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Mengembangkan sistem penopang pemerintahan dan birokrasi berbasis TIK
		Peningkatan kemudahan dan akses layanan melalui pelayanan terpadu

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Menguatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		Mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan profesional
		Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
		Mengembangkan layanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
		Mengembangkan statistik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		Optimalisasi pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi
		Mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan untuk menunjang akuntabilitas
		Mengembangkan birokrasi yang egaliter dan berintegritas
	Peningkatan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan kemitraan hubungan dengan beberapa elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan
3.a. Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan	Peningkatan Kualitas tenaga kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan tata kelola lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan
		Mengembangkan pelatihan kerja berbasis vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan dan pengembangan pertanian terpadu	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
		Meningkatkan produksi hasil peternakan dan populasi ternak
		Meningkatkan kelembagaan pertanian
	Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta pemberdayaan petani ikan	Meningkatkan produksi perikanan
	Peningkatan dan pengembangan ketersediaan sarana produksi dan infrastruktur pertanian	Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan input produksi
		Meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi
	Peningkatan kualitas produk daerah	Mengembangkan ekspor dan meningkatkan mutu komoditas ekspor
		Mengembangkan industri hulu hilir
	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Menciptakan iklim usaha yang kondusif
	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan kemandirian pangan
		Mendorong konsumsi pangan lokal yang mendukung usaha pertanian
3.b. Meningkatnya daya saing daerah	Penciptaan iklim kreatif, inovatif dan jiwa kewirausahaan yang berorientasi kemajuan	Mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi berkelanjutan
		Mengarahkan litbang daerah sebagai salah satu penopang kemandirian daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Mewujudkan Wonosobo sebagai daerah pariwisata/budaya yang didukung pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal (<i>agro-eco-culture-tourism</i>)
		Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah
	Peningkatan kapasitas fiskal	Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah
	Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk peningkatan investasi dan pengembangan ekonomi	Meningkatkan kemudahan, perlindungan dan kepastian berusaha
		Mengembangkan sistem penopang untuk kemudahan informasi bisnis dan investasi
	Peningkatan karakter berprestasi dan mandiri serta menghargai nilai budaya	Meningkatkan budaya baca dan cerdas bermedia
		Menumbuhkan budaya olahraga dan berprestasi masyarakat
		Menumbuhkan kebanggaan terhadap produk dan identitas Wonosobo
4.a Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Percepatan pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi masyarakat	Meningkatkan dan pemeratakan akses layanan pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan
		Meningkatkan mutu layanan pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sekolah inklusi
		Meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemenuhan layanan dasar kesehatan bagi masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi penduduk usia dewasa
		Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan
		Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu tenaga kesehatan
		Meningkatkan mutu dan cakupan jaminan kesehatan
		Meningkatkan kesadaran perilaku serta kemandirian masyarakat dan keluarga dalam memelihara kesehatan
	Pemenuhan layanan dasar sosial bagi masyarakat	Menyelenggarakan perlindungan sosial secara komprehensif
		Memperkuat peran kelembagaan sosial
	Pemenuhan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat	Menurunkan angka kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (<i>backlog</i>)
		Manajemen lingkungan dan mempercepat cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman
		Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	Pemenuhan layanan dasar Pekerjaan Umum bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase dan irigasi)
4.b. Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan	Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
masyarakat secara lebih berkeadilan	Peningkatan kesetaraan, keadilan gender dan pemenuhan hak anak	Mengarusutamakan gender dan hak anak dalam pembangunan
		Meningkatkan kapasitas perempuan
	Pemenuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Mengembangkan model pendidikan ramah anak
	Optimalisasi pengendalian kuantitas dan persebaran penduduk melalui pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga	Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses layanan KB
		Meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan dan partisipasi
		Peningkatan KIE dan peran <i>peer to peer</i> grup remaja dalam peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS
	Penjaminan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan adminduk capil	Memperluas akses dan prosedur pelayanan adminduk dan capil
	Penguatan kepastian hukum terhadap hak - hak tanah	Penataan administrasi pertanahan terhadap lahan-lahan aset negara sebagai salah satu sumber daya pembangunan
4.c. Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	Pemerataan pembangunan wilayah	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		Memperbesar aksesibilitas wilayah
		Pengembangan pusat pertumbuhan
	Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kawasan	Menciptakan desa pusat pertumbuhan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Penataan sistem transportasi	Mengembangkan sistem transportasi yang efisien tataran transportasi lokal (tatralok)
		Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang layak
4.d. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu
		Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masy miskin dan kurang mampu
4.e. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja	Peningkatan akses ketrampilan serta optimalisasi pengelolaan aset masy miskin dan sumberdaya lokal
		Meningkatkan akses informasi, peluang dan kapasitas tenaga kerja terutama bagi masyarakat kelompok rentan
	Peningkatan akses terhadap sarana prasarana pendukung ekonomi	Meningkatkan kemudahan akses permodalan termasuk berbagai skema kredit untuk usaha mikro dan rumah tangga
	Penguatan pemberdayaan masyarakat	Mereformulasi upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kekuatan dan potensi untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif desa
		Menerapkan <i>One District One Product (ODOP)</i> dan <i>One Village One Product (OVOP)</i> sebagai basis pengembangan potensi lokal
5.a Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan	Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipatif dan berkeadilan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
berkesinambungan	lingkungan dan sumber daya alam secara rasional berdasarkan prinsip berkelanjutan	Menerapkan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup
		Adopsi dan pengarusutamaan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam <i>assessment program</i>
	Meningkatkan pengelolaan persampahan secara partisipatif	Meningkatkan Partisipasi masyarakat untuk memperluas cakupan layanan persampahan
	Penerapan ekonomi hijau (<i>green economy</i>) sebagai salah satu prinsip pembangunan	Meningkatkan kualitas/praktek pertanian ramah lingkungan
	Transformasi perspektif perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman kekayaan hayati dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Mengembangkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta memperluas upaya pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
5.b. Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan berdasarkan prinsip keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan;	Peningkatan ketersediaan energi	Peningkatan elektrifikasi rumah tangga
	Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi	Optimalisasi Pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif untuk energi baru dan terbarukan dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan energi yang menerapkan prinsip hemat energi
5.c. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Peningkatan kemampuan adaptasi dan upaya mitigasi bencana	Pengurangan resiko bencana

Arah kebijakan, program dan indikator program di atas secara lebih rinci akan dijelaskan pada **Bab VII yaitu Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**. Sedangkan untuk menyelaraskan sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021 ditetapkan tema pembangunan per tahun, sebagai berikut:

1. Tahun 2017 : **“Pemantapan Kualitas reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktifitas Daerah Guna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan”**;
2. Tahun 2018 : **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Serta Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Mengurangi Kemiskinan”**;
3. Tahun 2019 : **“Pemantapan Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan”**;
4. Tahun 2020 : **“Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis Kabupaten Pintar (*Smart Regency*) untuk Pemantapan Perekonomian Daerah Kabupaten”**; dan
5. Tahun 2021 : **“Pemantapan Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah”**

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Tema yang diangkat pada RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 ini yaitu: **“Pemantapan Kualitas Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Daerah Guna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan”**. Penjabaran makna dari tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik**, dengan fokus pada:
 - a. Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pengembangan sistem penopang (*support system*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk penguatan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan;
 - c. Pengelolaan aset daerah secara profesional.
2. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai perspektif hak warga (*rights-based approach*)**, melalui:
 - a. Peningkatan akses pendidikan dasar universal 12 tahun;
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan akses informasi bursa kerja dan pelatihan;
 - c. Peningkatan derajat kesehatan untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), layanan kesehatan dasar dan pencegahan penyakit menular;
 - d. Peningkatan layanan jaminan kesehatan masyarakat;
 - e. Peningkatan pengetahuan dan kecukupan pangan yang berkualitas;
 - f. Pemenuhan layanan dasar PMKS.

3. **Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah**, melalui:
 - a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis kabupaten dan jalan poros desa untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan;
 - b. Peningkatan akses sanitasi dan air minum layak bagi masyarakat;
 - c. Pengurangan areal kawasan kumuh (RTLH) perkotaan dan *spot* kumuh perdesaan;
 - d. Pengembangan infrastruktur dan sistem penopang layanan di kecamatan untuk mendukung layanan administrasi dan perijinan terintegrasi.
4. **Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan**, melalui:
 - a. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
 - b. Pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan.
5. **Meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran**, melalui:
 - a. Pengembangan infrastruktur ekonomi di pusat pertumbuhan kawasan perdesaan (pengembangan pasar desa);
 - b. Pengembangan kawasan perdesaan melalui agropolitan, minapolitan, dan agroindustri.
6. **Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM**, melalui:
 - a. Peningkatan ketahanan pangan melalui percepatan peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas;
 - b. Pembangunan dan pengembangan pariwisata terpadu;
 - c. Pengembangan pasar kecamatan sebagai penyangga perekonomian kabupaten berbasis kawasan pertumbuhan;
 - d. Pembangunan ekonomi lokal melalui Percepatan Pengembangan Koperasi, UMKM/IKM berbasis sentra, klaster, inkubator bisnis, dan OVOP;
 - e. Peningkatan Investasi dan Ekspor Komoditas Unggulan;
 - f. Pengendalian Inflasi Daerah.
7. **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim**, melalui:
 - a. Pemantapan penataan ruang daerah;
 - b. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
 - c. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk aktivitas publik dan komunitas;

- d. Perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah-daerah yang rawan bencana;
- e. Peningkatan ketahanan komunitas (*resilient community*) tanggap bencana;

8. Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi, melalui:

- a. Penguatan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas dalam kemitraan stabilitas, ketentraman, dan ketertiban;
- b. Pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat;
- c. Peningkatan pelayanan angkutan dan keamanan lalu lintas yang nyaman, manusiawi, dan berperspektif ramah HAM;
- d. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kemitraan sistem kewaspadaan dini.